

Rangkuman

Keberhasilan pengendalian: Sejauh ini, pandemi telah berhasil dikendalikan di sebagian kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) kecuali di Indonesia dan Filipina. Pandemi masih menjadi ancaman bagi negara-negara lain, yang terakhir adalah Myanmar. Negara-negara yang berhasil mengendalikan penyakit ini telah bertindak melalui *kombinasi* pembatasan mobilitas yang ketat, strategi berbasis pengujian yang ekstensif dan program-program penyuluhan untuk mendorong sikap kehati-hatian

Kesulitan ekonomi: Pandemi ini dan upaya-upaya untuk pengendalian dan penyebaran sangat menghambat kegiatan ekonomi. Kesulitan domestik semakin parah dengan adanya resesi global akibat pandemi yang menghantam negara-negara di Kawasan EAP, terutama mereka yang mengandalkan sektor perdagangan dan pariwisata. Performa ekonomi suatu negara umumnya terkait dengan seberapa efisien negara tersebut berhasil mengendalikan pandemic dan seberapa parah negara itu terpapar guncangan eksternal. Output menyusut 1,8 persen di Tiongkok pada pertengahan pertama tahun ini dan 4,0 persen secara rata-rata di seluruh kawasan EAP. Guncangan COVID-19 diperkirakan akan menambah jumlah penduduk miskin di kawasan ini sebanyak 38 juta jiwa pada tahun 2020. Dari jumlah ini, 33 juta jiwa seharusnya telah keluar dari garis kemiskinan dan 5 juta jiwa lainnya kembali jatuh ke di bawah garis kemiskinan (garis kemiskinan ditetapkan pada \$5,50 per hari (Paritas Daya Beli (PPP) tahun 2011).

Bantuan keuangan: Pemerintah di negara – negara di kawasan EAP telah berkomitmen untuk membelanjakan rata-rata hampir 5 persen dari PDB untuk mendukung sistem kesehatan masyarakat, membantu memperlancar konsumsi rumah tangga, dan membantu dunia usaha agar tidak jatuh pailit. Namun, karena negara-negara tersebut sebelumnya hanya membelanjakan rata-rata kurang dari 1 persen PDB untuk bantuan sosial, meningkatkan dan mengimplementasikan komitmen tersebut menjadi tidak mudah. Di beberapa negara, bantuan yang diberikan sejauh ini hanya menjangkau kurang dari seperempat rumah tangga terdampak dan hanya 10-20 persen dari perusahaan terdampak yang memenuhi syarat. Yang paling sulit untuk dilakukan adalah menjangkau pekerja dan perusahaan di sektor informal. Bantuan yang diberikan terus menerus dalam kondisi krisis berkepanjangan akan menekan anggaran dan pendapatan yang sempit bagi negara-negara di kawasan EAP.

Beragam prospek pemulihan: Keberhasilan pengendalian penyakit Covid-19 di beberapa negara mendorong bangkitnya aktivitas perekonomian domestik. Namun, perekonomian kawasan EAP masih sangat bergantung pada kawasan lain di dunia serta permintaan global yang masih belum membaik. Ketika perdagangan kembali bangkit dan aktivitas perekonomian global mulai bergerak, sektor pariwisata tampaknya masih belum akan pulih dalam waktu dekat. Meskipun pergerakan modal jangka pendek sudah kembali ke kawasan EAP, ketidakpastian global masih menghambat investasi domestik maupun asing. Kapasitas pemerintah yang tertekan secara keuangan untuk menstimulasi perekonomian juga terbatas. Kawasan EAP diprediksi akan mengalami pertumbuhan hanya sebesar 0,9 persen pada tahun 2020. Tiongkok, sebaliknya, diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 2 persen, didorong oleh tingkat infeksi baru yang rendah sejak awal Maret serta kebijakan domestik yang memprioritaskan pemulihan produksi dan meningkatkan investasi public. Negara -negara lain di kawasan EAP, di lain pihak, diproyeksi akan mengalami penyusutan rata-rata sebesar 3,5 persen pada tahun 2020. Kawasan EAP mempunyai prospek yang lebih baik di tahun 2021, dengan tingkat pertumbuhan yang diperkirakan akan mencapai 7,9 persen di Tiongkok dan 5,1 persen di negara-negara lain di kawasan EAP. Perkiraan ini didasarkan atas asumsi pemulihan yang akan berlangsung di kawasan EAP serta kembali-normal nya aktivitas ekonomi di negara-negara utama kawasan, dan, yang terpenting, kemungkinan hadirnya vaksin COVID-19. Akan tetapi, output yang dicapai selama dua tahun ke depan diperkirakan akan masih jauh di bawah proyeksi pra-pandemi. Beberapa Negara Kepulauan Pasifik yang sangat terpapar oleh krisis diproyeksikan mencapai output sekitar 10 persen di bawah level pra-krisis pada akhir tahun 2021.

Dampak negatif terhadap pertumbuhan inklusif: COVID-19 akan meninggalkan dampak yang lama terhadap pertumbuhan inklusif jangka Panjang. Hal ini dikarenakan terhambatnya investasi, pertumbuhan modal manusia dan produktivitas. Utang publik dan swasta, yang disertai dengan memburuknya neraca perbankan dan meningkatnya ketidakpastian, akan menghambat investasi publik dan swasta, serta mendatangkan risiko terhadap kestabilan ekonomi. Serangan penyakit, kelangkaan pangan, hilangnya pekerjaan dan penutupan sekolah-sekolah dapat menyebabkan pengikisan modal manusia serta hilangnya penghasilan yang berdampak seumur hidup. Penutupan usaha dan terganggunya hubungan perusahaan dengan pekerjanya menghambat produktivitas dikarenakan hilangnya aset tak berwujud yang berharga. Terganggunya perdagangan dan rantai nilai global menghambat produktivitas, yang menyebabkan kurang efisiennya pengalokasian sumber daya di berbagai sektor dan memperlambat penyebaran teknologi. Jika tidak diatasi, konsekuensi pandemi dapat mengurangi pertumbuhan kawasan selama satu dekade mendatang sebesar 1 poin persentase per tahun. Masyarakat miskin menjadi sangat tidak berdaya akibat berkurangnya akses mereka untuk mendapatkan layanan rumah sakit, sekolah, lapangan pekerjaan dan keuangan. Dampak negatif terhadap pertumbuhan dan distribusi ini mungkin sebagian dapat diimbangi dengan percepatan penyebaran teknologi untuk penanggulangan COVID-19, yang dapat mendorong produktivitas dan memperbaiki akses pelayanan bagi masyarakat miskin.

Sudut pandang kebijakan yang terpadu: Pilihan kebijakan untuk mengendalikan COVID-19 dan pemberian bantuan keuangan hari ini idealnya ditentukan oleh pengaruhnya terhadap pemulihan dan pertumbuhan esok hari. Pilihan kebijakan di satu bidang, misalnya kesehatan, akan berdampak pada tujuan di bidang-bidang lain, misalnya ekonomi. Pemerintah menghadapi dilema yang sulit. Pengeluaran dalam jumlah signifikan untuk bantuan keuangan atau stimulus peningkatan konsumsi rumah tangga dapat menyebabkan pemerintah berutang dan kesulitan melakukan investasi untuk infrastruktur dan pertumbuhan. Bagaimana pemerintah mendistribusikan beban utang publik ini kepada orang perorangan kedepannya – melalui pajak tidak langsung, pajak penghasilan dan pajak atas laba, inflasi atau represi keuangan – sangat penting bagi pertumbuhan maupun distribusi. Krisis ini menunjukkan bahwa, dengan memiliki pandangan yang dinamis, pemerintah di kawasan EAP dapat dibantu untuk membuat pilihan hari ini yang mengurangi dilema esok hari di tujuh bidang kunci, yaitu:

- ***Peningkatan kapasitas untuk pengendalian pintar (smart containment)*** – termasuk untuk melakukan pengujian, penelusuran dan isolasi – akan membantu mengendalikan lonjakan penyakit melalui upaya-upaya yang lebih tepat sasaran dan tidak terlalu mengganggu perekonomian. Misalnya, hasil analisis awal menunjukkan bahwa pengujian terbuka kepada masyarakat (*open public testing*), termasuk kepada orang tanpa gejala (OTG), dapat mengurangi jumlah infeksi sebanyak 10 persen dalam satu bulan. Pada saat yang sama, kerjasama internasional untuk mendorong pengembangan vaksin dan persiapan distribusi vaksin secara efisien dan adil akan menyumbang kepada terwujudnya stabilitas sosial pemulihan ekonomi.
- ***Inisiasi reformasi fiskal*** dapat meningkatkan nilai belanja bantuan keuangan tanpa mengorbankan investasi publik. Keterbatasan anggaran berdampak buruk karena mobilisasi pendapatan sangat rendah di negara-negara EAP selain Tiongkok. Rasio pendapatan negara terhadap PDB di negara – negara Kawasan EAP selain Tiongkok hanya 18 persen secara rata-rata, lebih rendah dibandingkan dengan rata – rata di negara-negara berkembang lain (25 persen) dan negara – negara maju (36 persen). Ketergantungan yang lebih besar pada pajak tidak langsung yang mencapai lebih dari 50 persen pendapatan pemerintah di beberapa negara telah memperbesar hilangnya pendapatan dalam keadaan krisis dikarenakan konsumsi yang turun drastis. Defisit fiskal yang besar di kawasan EAP diperkirakan akan meningkatkan utang pemerintah sebesar, rata-rata, 7 persen PDB pada tahun 2020. Utang swasta yang tinggi dan terus bertambah merupakan risiko tidak langsung lain bagi keuangan pemerintah. Perluasan basis pajak dengan pengenaan pajak yang lebih progresif atas penghasilan dan laba, dan penghematan belanja untuk subsidi energi regresif yang dalam beberapa kasus mencapai lebih dari 2 persen PDB, dapat membuat pemulihan lebih inklusif dan berkelanjutan.

- Pemerintah-pemerintah di kawasan EAP perlu **menjaga reputasi yang telah mereka capai dengan susah payah untuk melakukan kehati-hatian finansial** (*financial prudence*) dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat. Meskipun pemerintah-pemerintah di kawasan EAP sebagian besar membiayai defisit dengan pinjaman domestik, beberapa dari mereka juga mendorong bank sentral untuk membeli obligasi pemerintah (*sovereign bonds*). Jika dilakukan melampaui batas tertentu, tindakan-tindakan tersebut justru dapat melemahkan independensi bank sentral dan pengendalian inflasi yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi makro. Ketergantungan yang berlebihan pada sistem perbankan sebagai sarana untuk menyalurkan bantuan juga bisa menimbulkan risiko. Data memperlihatkan bahwa bank-bank di kawasan EAP mempunyai modal yang relatif baik, tetapi kredit bermasalah juga meningkat meskipun penerapan tindakan kehati-hatian dan beberapa aturan akuntansi direlaksasi. Walaupun kebijakan-kebijakan itu mungkin dibutuhkan saat ini, komitmen yang kredibel untuk melakukan transparansi dan mengembalikan disiplin keuangan sejak dini dapat membantu memitigasi risiko instabilitas.
- Perlindungan sosial mempunyai tiga peran, yaitu: memitigasi dampak langsung krisis; membantu reintegrasi tenaga kerja ketika negara mulai pulih; dan mencegah kerugian jangka panjang terhadap modal manusia. **Perluasan perlindungan sosial** untuk menjangkau seluruh orang miskin lama maupun baru yang disertai dengan investasi infrastruktur pelayanan akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkannya. Malaysia, dengan sistem identitas nasional universal, cakupan layanan ponsel yang luas dan tingkat inklusi keuangan yang tinggi, telah melaksanakan transfer bantuan tunai berskala besar dengan tingkat implementasi 99 persen, yang menjangkau lebih dari 10 juta penerima manfaat. Sebaliknya, banyak negara di Kepulauan Pasifik masih tertinggal dalam pengembangan sistem perlindungan sosial, dan perlu menerapkan perlindungan fleksibel yang dapat disesuaikan dan ditingkatkan dalam menghadapi guncangan-guncangan besar.
- **Penyusunan strategi pendidikan sekolah pintar** untuk melindungi siswa, staf, guru dan keluarga mereka – yang mencakup protokol kesehatan, praktek menjaga jarak sosial (*social distance practices*), pendaftaran ulang siswa – dapat mencegah hilangnya modal manusia (*Human Capital*) dalam jangka panjang, terutama di kalangan masyarakat miskin. Penutupan sekolah-sekolah akibat COVID-19 dapat menyebabkan hilangnya 0,7 tahun pembelajaran berkualitas di sekolah (*learning-adjusted years of schooling*) di negara-negara kawasan EAP. Akibatnya, rata-rata setiap siswa di kawasan ini dapat mengalami penurunan penghasilan yang diperkirakan sebesar 4 persen setiap tahun selama masa kerja mereka.
- **Dukungan kepada dunia usaha** dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kepailitan dan timbulnya pengangguran serta mempermudah realokasi tenaga kerja dan sumber daya ke perusahaan-perusahaan dan sektor-sektor. Sebagian besar pemerintah di kawasan EAP telah memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan namun aksesnya masih belum merata karena jumlah perusahaan yang mendapatkan bantuan baru mencapai 10-20 persen saja di beberapa negara yang disurvei. Pemberian dukungan sedapat mungkin didasarkan pada kriteria yang transparan dan obyektif, bukan hanya yang berkaitan dengan kinerja di masa lalu atau kesulitan saat ini, melainkan juga potensinya untuk berkembang di masa mendatang. Dan, untuk menghindari pemberian bantuan berkepanjangan secara tidak perlu maka pemerintah dapat menyatakan akan menghapus bantuan secara bertahap berdasarkan indikator-indikator pemulihan ekonomi makro yang nyata. Banyak usaha mikro dan usaha informal beroperasi di luar sistem keuangan dan perpajakan sehingga sulit dijangkau dan paling cocok diberikan dukungan melalui intervensi perlindungan sosial.

- Krisis mempercepat empat tren yang ada di sektor perdagangan: tahap awal pemulihan di kawasan EAP semakin memperkuat *regionalisasi*; perasaan antipati terhadap ketergantungan yang berlebihan dalam rantai pasokan mendorong *relokasi* Rantai Nilai Global (GVC) dari Tiongkok; digitisasi mendorong terbentuknya *servisifikasi* (*servicification*); dan keinginan yang kuat untuk mandiri meningkatkan *proteksi* di beberapa bidang, bahkan meskipun negara itu menjadi liberal di sektor-sektor lain. Negara-negara di kawasan EAP perlu ***memperdalam reformasi perdagangan***, khususnya di sektor-sektor yang masih diproteksi – keuangan, transportasi, komunikasi – untuk meningkatkan produktivitas usaha, menghindari tekanan untuk memproteksi sektor-sektor lain, dan memperlengkapi masyarakat yang ingin memanfaatkan peluang digital ketika kemunculan pandemi semakin cepat. Tiongkok dapat menambah 0,5 persen untuk PDBnya sendiri maupun PDB regionalnya dengan memperluas preferensi perjanjian bilateralnya dengan Amerika Serikat kepada semua negara, seraya memulai program reformasi domestik dan pembukaan pasar yang lebih mendalam.